

KEPEMIMPINAN
DESA

**TEORI, PRAKTIK, DAN TANTANGAN
PEMERINTAHAN DESA**

Dr. Awaludin, S.E., M.Si.

KEPEMIMPINAN DESA

Teori, Praktik, Dan Tantangan Pemerintahan Desa

Dr. Awaludin, S.E., M.Si.



Penerbit KBM Indonesia

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku

Kepemimpinan Desa

Teori, Praktik, Dan Tantangan Pemerintahan Desa

Copyright @2026 by Dr. Awaludin, S.E., M.Si.

All rights reserved

KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) NO. IKAPI 279/JTI/2021

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor) 081357517526 (Tlpn/WA)

Penulis

Dr. Awaludin, S.E., M.Si.

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Lailatul Nur Ula

Editor Naskah

Zainul Arifin, M.Pd.

ISBN

978-634-278-153-1

15,5 x 23 cm, vi + 117 halaman

Cetakan ke-1, Februari 2026

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di

DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Website

<https://penerbitkbm.com> | www.penerbitbukumurah.com

Instagram

@penerbit.kbmindonesia | @penerbitbukujogja

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku yang berjudul **“Kepemimpinan Desa: Teori, Praktik, dan Tantangan Pemerintahan Desa”** ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi pemikiran akademik dan praktis dalam memperkaya kajian kepemimpinan desa, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia.

Kepemimpinan desa memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan nasional. Desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga kualitas kepemimpinan kepala desa sangat menentukan keberhasilan pelayanan publik, pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam era otonomi desa dan meningkatnya tuntutan transparansi serta akuntabilitas publik, kepala desa dituntut untuk tidak hanya mampu menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki kapasitas kepemimpinan yang berintegritas, partisipatif, dan adaptif terhadap perubahan.

Buku ini disusun dengan pendekatan konseptual dan kontekstual, mengintegrasikan teori kepemimpinan, administrasi publik, serta praktik pemerintahan desa. Pembahasan dalam buku ini mencakup kedudukan dan peran kepala desa, dinamika sosial dan politik desa, pengambilan keputusan publik, pelayanan publik desa, hingga tantangan dan model ideal kepemimpinan desa di masa depan. Dengan pendekatan tersebut, buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kepemimpinan desa, baik bagi kalangan akademisi, mahasiswa, maupun praktisi pemerintahan desa.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna memperbaiki dan mengembangkan kualitas buku ini ke depan.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi pengembangan kapasitas kepemimpinan desa serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Indonesia.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia akademik dan praktik pemerintahan desa, serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan desa yang mandiri, demokratis, dan berkeadilan.

Medan, 2026

Penulis
Dr. Awaludin, S.E., M.Si.

Daftar Isi

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Kepemimpinan Desa di Indonesia	1
	B. Kedudukan dan Peran Strategis Kepala Desa	2
	C. Dinamika Sosial, Politik, dan Administrasi Desa.....	4
	D. Permasalahan Kepemimpinan Desa Kontemporer	6
	E. Tujuan dan Sistematika Penulisan Buku	7
BAB II	KONSEP DASAR KEPEMIMPINAN.....	11
	A. Pengertian Kepemimpinan dalam Perspektif Ilmu Administrasi	12
	B. Teori-Teori Kepemimpinan Klasik dan Modern	13
	C. Kepemimpinan dalam Organisasi Publik	15
	D. Kepemimpinan Berbasis Nilai dan Etika Publik....	17
BAB III	KEPEMIMPINAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA	19
	A. Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	19
	B. Landasan Hukum Kepemimpinan Desa	21
	C. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepala Desa.....	22
	D. Hubungan Kepemimpinan Desa Dengan Pemerintah Daerah Desa	24
BAB IV	KEPEMIMPINAN DESA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS EKONOMI DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	29
	A. Konsep Tata Kelola Pemerintahan Desa	30
	B. Kepemimpinan Desa dan Pengelolaan Ekonomi Desa	32

C.	Kepemimpinan Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	34
D.	Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pemerintahan Desa	35
E.	Kepemimpinan Desa dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Masyarakat	37

BAB V

KEPEMIMPINAN DESA YANG MEMBANGUN KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN EKONOMI DAN SDM		39
A.	Konsep Kepercayaan Publik dalam Pemerintahan Desa	41
B.	Peran Kepemimpinan Desa dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat	42
C.	Kepemimpinan Desa dan Kepuasan Pelayanan Publik.....	44
D.	Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan Persepsi Masyarakat	45
E.	Kepemimpinan Desa sebagai Penentu Legitimasi Sosial.....	46

BAB VI

KEPEMIMPINAN DESA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK		49
A.	Pengambilan Keputusan dalam Administrasi Publik.....	51
B.	Tanggung Jawab Kepala Desa dalam Pengambilan Keputusan.....	52
C.	Diskresi Kepemimpinan Desa dan Batas-Batasnya.....	53
D.	Etika dan Moralitas dalam Keputusan Publik Desa	54
E.	Akuntabilitas Keputusan Kepala Desa kepada Masyarakat	55

BAB VII

KEPEMIMPINAN DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK ...		57
A.	Kepemimpinan Desa dan Kualitas Pelayanan Publik.....	58
B.	Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur	59
C.	Kepemimpinan dan Manajemen Pelayanan Administrasi Desa	61

	D. Kepemimpinan Desa dalam Menangani Keluhan Masyarakat	62
	E. Kepuasan Masyarakat sebagai Indikator Keberhasilan Kepemimpinan	63
BAB VIII	KEPEMIMPINAN DESA DAN INOVASI PEMERINTAHAN	65
	A. Inovasi Kepemimpinan di Tingkat Desa	66
	B. Kepemimpinan Desa dalam Digitalisasi Pelayanan Publik.....	68
	C. Pemanfaatan Sistem Informasi Desa.....	70
	D. Tantangan Literasi Digital Aparatur dan Masyarakat	71
	E. Kepemimpinan Adaptif dalam Perubahan Sosial dan Teknologi	72
BAB IX	TANTANGAN DAN PROBLEMATIKA KEPEMIMPINAN DESA	75
	A. Konflik Sosial dan Politik Lokal	76
	B. Kepemimpinan Desa dan Penyalahgunaan Wewenang.....	78
	C. Tekanan Politik dan Kepentingan Elite Lokal	81
	D. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia Desa	82
	E. Strategi Menghadapi Tantangan Kepemimpinan Desa	83
BAB X	MODEL IDEAL KEPEMIMPINAN DESA.....	85
	A. Karakteristik Kepemimpinan Desa Ideal	87
	B. Model Kepemimpinan Desa Berbasis Pelayanan (<i>Servant Leadership</i>).....	88
	C. Kepemimpinan Desa Berbasis Partisipasi dan Kepercayaan	90
	D. Kepemimpinan Desa Berbasis Etika dan Akuntabilitas	91
	E. Rekomendasi Penguatan Kepemimpinan Desa ke Depan	92
BAB XI	PENUTUP	95
	A. Simpulan.....	97
	B. Implikasi Teoretis dan Praktis.....	98
	C. Rekomendasi Kebijakan Kepemimpinan Desa	99

D. Arah Pengembangan Studi Kepemimpinan	
Desa	100
DAFTAR PUSTAKA	103
GLOSARIUM	113
PROFIL PENULIS	117

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Kepemimpinan Desa di Indonesia

Desa adalah pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Setiap kebijakan, keputusan, dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa langsung dirasakan oleh warga. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan kepala desa.

Dalam praktik sehari-hari, kepala desa bukan hanya berperan sebagai pejabat administratif, tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat. Kepala desa menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi, keluhan, dan harapan. Posisi ini menuntut kepala desa untuk mampu memimpin dengan bijak, adil, dan bertanggung jawab, serta mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui tindakan nyata.

Kepemimpinan desa di Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Hal ini berarti kepala desa memiliki peran yang semakin besar dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran desa, serta pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Namun, kewenangan yang besar tersebut juga diiringi dengan tanggung jawab yang besar. Kepala desa dituntut untuk mampu mengelola pemerintahan desa secara transparan, akuntabel, dan profesional.

Kesalahan dalam kepemimpinan, seperti pengambilan keputusan yang tidak adil atau kurang terbuka, dapat menimbulkan konflik, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan menghambat pembangunan desa.

Selain itu, kondisi masyarakat desa saat ini semakin dinamis dan kritis. Masyarakat semakin memahami hak-haknya, terutama terkait pelayanan publik dan penggunaan dana desa. Perkembangan teknologi informasi juga mendorong keterbukaan dan kecepatan penyebaran informasi. Dalam situasi ini, kepala desa perlu memiliki kemampuan kepemimpinan yang adaptif, mampu berkomunikasi dengan baik, serta terbuka terhadap perubahan dan inovasi.

Dengan demikian, kepemimpinan desa bukan hanya tentang menjalankan aturan, tetapi juga tentang bagaimana kepala desa mampu memimpin dengan hati nurani, melayani masyarakat, dan mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan bersama. Pemahaman yang baik mengenai latar belakang kepemimpinan desa ini diharapkan dapat membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya secara lebih efektif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

B. Kedudukan Dan Peran Strategis Kepala Desa

Kepala desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di tingkat desa yang bertanggung jawab langsung atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa. Kedudukan ini menjadikan kepala desa sebagai pengambil keputusan utama dalam berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan di desa. Secara hukum, kedudukan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Dengan dasar hukum tersebut, kepala desa

memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan kewenangan pemerintahan sekaligus tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Selain sebagai pemimpin administratif, kepala desa juga berperan sebagai pemimpin sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kepala desa sering menjadi rujukan utama masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, seperti konflik antarwarga, masalah pelayanan administrasi, hingga persoalan pembangunan desa. Peran ini menuntut kepala desa untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sikap adil, serta kepekaan terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Peran strategis kepala desa juga terlihat dalam fungsi pengambilan keputusan. Setiap keputusan kepala desa, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik, pengelolaan anggaran desa, maupun pembangunan desa, memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kepala desa dituntut untuk mengambil keputusan secara hati-hati, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan yang tepat dan adil akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat, sedangkan keputusan yang keliru dapat menimbulkan konflik dan menurunkan legitimasi kepemimpinan.

Di era otonomi desa dan pengelolaan dana desa, kepala desa memiliki peran strategis sebagai pengelola sumber daya desa. Kepala desa harus mampu memastikan bahwa penggunaan anggaran desa dilakukan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, kepala desa dituntut untuk memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Lebih lanjut, kepala desa juga berperan sebagai penggerak dan motivator aparatur desa. Kinerja perangkat desa sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan kepala desa. Kepala desa yang mampu memberikan teladan, membangun kerja sama tim, serta mendorong peningkatan kompetensi aparatur akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan demikian, kedudukan dan peran strategis kepala desa tidak hanya terletak pada kewenangan formal yang dimilikinya, tetapi juga pada kemampuannya dalam memimpin, melayani, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kepala desa yang efektif adalah pemimpin yang mampu menyeimbangkan peran sebagai pejabat pemerintahan dan pemimpin masyarakat, serta menjadikan kepentingan masyarakat sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan dan tindakan.

C. Dinamika Sosial, Politik, dan Administrasi Desa

Kepemimpinan desa berlangsung dalam konteks dinamika sosial, politik, dan administrasi yang terus berkembang di lingkungan desa. Desa tidak semata-mata dipahami sebagai satuan wilayah administratif, melainkan juga sebagai ruang sosial yang diwarnai oleh hubungan kekerabatan, nilai-nilai adat, budaya lokal, serta kepentingan masyarakat yang beragam. Kondisi tersebut membentuk karakter kepemimpinan desa dan memengaruhi cara kepala desa menjalankan fungsi kepemimpinan, membangun komunikasi, serta mengambil keputusan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat desa umumnya memiliki tingkat homogenitas yang relatif tinggi dengan ikatan sosial yang kuat. Hubungan kekeluargaan dan kedekatan emosional antarwarga sering menjadi modal sosial yang penting dalam membangun solidaritas dan semangat gotong royong. Namun, ikatan sosial yang kuat ini juga dapat menghadirkan tantangan tersendiri bagi kepala desa, khususnya ketika harus mengambil keputusan yang menuntut ketegasan dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sebagian masyarakat. Dalam situasi seperti ini, kepala desa dituntut memiliki kepekaan sosial serta kemampuan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif masyarakat desa.

Selain aspek sosial, dinamika politik desa turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepemimpinan desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung kerap memunculkan kompetisi politik yang intens dan meninggalkan dampak sosial yang berkelanjutan setelah proses pemilihan berakhir. Perbedaan

preferensi politik, keberpihakan kelompok tertentu, serta peran elite lokal dapat memengaruhi stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks ini, kepala desa dituntut untuk mampu menempatkan diri sebagai pemimpin seluruh warga desa, bukan hanya sebagai representasi kelompok pendukungnya, serta membangun kepemimpinan yang inklusif dan merangkul seluruh elemen masyarakat.

Di samping dinamika sosial dan politik, perubahan dalam aspek administrasi desa juga menjadi bagian penting dari tantangan kepemimpinan desa. Pemerintahan desa saat ini dihadapkan pada tuntutan penerapan sistem administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa, pelaporan kegiatan, serta penyelenggaraan pelayanan publik harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan sistem administrasi berbasis digital semakin memperkuat tuntutan profesionalisme aparatur desa, khususnya dalam penguasaan kompetensi teknis dan pemahaman prosedur administrasi pemerintahan.

Transformasi sistem administrasi desa tersebut sering kali menimbulkan tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan kesiapan sumber daya manusia dan ketersediaan sarana pendukung. Kepala desa memegang peran penting dalam memimpin proses penyesuaian ini melalui pemberian arahan yang jelas, pembinaan aparatur desa, serta pengawasan yang berkelanjutan. Ketidaksiapan dalam mengelola perubahan administrasi berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan risiko permasalahan hukum bagi penyelenggara pemerintahan desa.

Keseluruhan dinamika sosial, politik, dan administrasi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan desa dijalankan dalam lingkungan yang kompleks dan penuh tantangan. Kepala desa dituntut untuk memiliki kapasitas kepemimpinan yang adaptif, kemampuan komunikasi yang efektif, serta integritas dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya. Penguasaan terhadap dinamika desa menjadi prasyarat penting bagi kepala desa dalam menciptakan pemerintahan desa yang stabil, harmonis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

D. Permasalahan Kepemimpinan Desa Kontemporer

Kepemimpinan desa pada era kontemporer dihadapkan pada berbagai permasalahan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan regulasi, meningkatnya tuntutan masyarakat, serta perkembangan sosial dan teknologi. Kepala desa tidak lagi hanya berperan sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin publik yang dituntut mampu mengelola kepentingan masyarakat yang beragam, menjaga stabilitas sosial, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara transparan dan akuntabel. Salah satu permasalahan utama dalam kepemimpinan desa kontemporer adalah keterbatasan kapasitas kepemimpinan dan manajerial sebagian kepala desa dan aparatur desa. Keterbatasan tersebut terlihat dalam perencanaan pembangunan desa, pengelolaan anggaran, serta pengambilan keputusan pelayanan publik yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas program desa dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Permasalahan lain yang kerap muncul berkaitan dengan aspek akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Meskipun regulasi telah mengatur secara jelas mengenai pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam praktiknya masih ditemukan lemahnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik. Ketidakjelasan dalam proses pengambilan keputusan serta pengelolaan anggaran desa berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Kepemimpinan desa juga dihadapkan pada dinamika politik lokal yang semakin intens. Proses pemilihan kepala desa yang kompetitif sering kali meninggalkan polarisasi sosial yang berkelanjutan selama masa kepemimpinan berlangsung. Tekanan politik dari kelompok pendukung, elite lokal, maupun kepentingan tertentu dapat memengaruhi independensi kepala desa dalam mengambil keputusan. Situasi ini menuntut kepala desa untuk memiliki keteguhan sikap, integritas, serta kemampuan menjaga netralitas dalam menjalankan pemerintahan desa.

Di samping itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan desa juga menjadi permasalahan kepemimpinan desa kontemporer. Dalam beberapa kasus, kebijakan desa masih bersifat top-down dan kurang melibatkan masyarakat secara bermakna. Minimnya ruang partisipasi dapat mengurangi rasa memiliki masyarakat terhadap program desa serta melemahkan legitimasi kepemimpinan kepala desa di mata publik.

Perkembangan teknologi informasi dan tuntutan digitalisasi pelayanan publik turut menghadirkan tantangan baru bagi kepemimpinan desa. Tidak semua kepala desa dan aparatur desa memiliki kesiapan dan kompetensi dalam mengelola sistem administrasi dan pelayanan berbasis digital. Ketidaksiapan ini dapat menghambat inovasi pelayanan publik dan menimbulkan kesenjangan pelayanan antara desa yang siap secara teknologi dan desa yang masih terbatas sumber dayanya.

Keseluruhan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan desa kontemporer membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kepala desa dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas kepemimpinan, memperkuat akuntabilitas dan transparansi, serta membangun partisipasi masyarakat secara inklusif. Pengelolaan permasalahan kepemimpinan desa secara tepat menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan desa yang efektif, demokratis, dan berkelanjutan.

E. Tujuan dan Sistematika Penulisan Buku

Penulisan buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kepemimpinan desa dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Buku ini disusun sebagai referensi akademik dan praktis yang mengkaji kepemimpinan desa tidak hanya dari sisi normatif dan kelembagaan, tetapi juga dari aspek sosial, politik, dan administratif yang melekat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui pendekatan tersebut, buku ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai peran dan tanggung jawab kepala desa sebagai pemimpin

pemerintahan sekaligus pemimpin masyarakat.

Secara khusus, buku ini bertujuan untuk menguraikan konsep dan teori kepemimpinan yang relevan dengan konteks pemerintahan desa, menjelaskan kedudukan dan peran strategis kepala desa, serta mengidentifikasi dinamika dan permasalahan kepemimpinan desa kontemporer. Selain itu, buku ini juga diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas kepemimpinan kepala desa melalui pemahaman prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan pengembangan kepemimpinan desa. Bagi kalangan akademisi dan mahasiswa, buku ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepemimpinan desa dan administrasi publik. Bagi praktisi pemerintahan desa, khususnya kepala desa dan aparatur desa, buku ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan refleksi dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kinerja pemerintahan desa.

Adapun sistematika penulisan buku ini disusun secara terstruktur dan sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca. Bab I menyajikan pendahuluan yang memuat latar belakang kepemimpinan desa di Indonesia, kedudukan dan peran strategis kepala desa, dinamika sosial, politik, dan administrasi desa, permasalahan kepemimpinan desa kontemporer, serta tujuan dan sistematika penulisan buku. Bab II membahas konsep dan teori kepemimpinan sebagai landasan analisis kepemimpinan desa. Bab III mengkaji kepemimpinan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Bab IV membahas kepemimpinan desa dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik. Bab V mengulas hubungan kepemimpinan desa dengan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Bab VI membahas kepemimpinan desa dalam pengambilan keputusan publik. Bab VII mengkaji peran kepemimpinan desa dalam pelayanan publik. Bab VIII membahas kepemimpinan desa dalam inovasi dan digitalisasi pemerintahan. Bab IX mengulas tantangan dan problematika kepemimpinan desa. Bab X menyajikan

model ideal kepemimpinan desa, dan Bab XI merupakan penutup yang berisi simpulan dan rekomendasi.

Melalui penyusunan sistematika tersebut, buku ini diharapkan dapat memberikan alur pembahasan yang runtut dan mendalam, sehingga pembaca memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai kepemimpinan desa serta mampu mengaplikasikan konsep dan pemikiran yang disajikan dalam praktik pemerintahan desa.

Daftar Pustaka

- . Rakhmat. 2017. "Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Good Governance." *Jurnal Paradigma (JP)* 2 (1): 1. <https://doi.org/10.30872/jp.v2i1.338>.
- Agus Dwiyanto. 2015a. *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, Dan Kolaboratif* / Agus Dwiyanto. <https://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=33227>.
- . 2015b. *Reformasi Birokrasi Kontekstual*.
- Agus Dwiyanto. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, Dan Kolaboratif*. <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=7799>.
- Agus Prianto. 2016. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Pengambilan Keputusan Di Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri)." *Jurnal Revitalisasi Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 05, No Mor 01, Maret 2016* 05: 7–14. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Revitalisasi/article/view/377/309>.
- Aji, Wahyu Trisno. 2024. "Dasar-Dasar Etika Politik Franz Magnis Suseno" 3 (4).
- Alfirdaus, Laila Kholid, Teguh Yuwono, D Ghulam Manar, *Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik, Fakultas Ilmu, and Ilmu Politik*. 2020. "Kemendagri (Ditjen Bina Pemerintahan" 01 (04).
- Ali UsmaN, Dkk. 2022. *Peluang Dan Tantangan Pendidikan Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0*. [https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/505/1/Peluang dan Tantangan Pendidikan di Era Industri 4.0 dan Society 5.0.pdf](https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/505/1/Peluang%20dan%20Tantangan%20Pendidikan%20di%20Era%20Industri%204.0%20dan%20Society%205.0.pdf).
- Arif Nugroho, dkk. 2024. *Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah*. https://www.researchgate.net/profile/Agus-Hakim-3/publication/388120847_Buku_Strategi_Optimalisasi_Pener

- filename=OECD Government at a Glance 2023.pdf.
- Dr. Ahmad Sulhan, S.Ag., M.Pd.I. 2019. *Manajemen Kepemimpinan Dan Organisasi Pendidikan Islam. Leppim Lembaga Penelitian Dan Pengkajian Intelektual Mahasiswa Uin Mataram*. <https://repository.uinmataram.ac.id/1029/1/ManajemenKepemimpinanDanOrganisasiPendidikanIslam.pdf>.
- Dr. Akhmad, S.E., M.Si. 2019. *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. https://www.researchgate.net/profile/Akhmad-Pide/publication/331175046_Manajemen_Keuangan_Daerah_Dalam_Era_Otonomi_Daerah/Links/5c739a4e299bf1268d22d44a/Manajemen-Keuangan-Daerah-Dalam-Era-Otonomi-Daerah.pdf?origin=publication_detail&_tp=eyJjb250ZXhoIjpb7ImZpcnNoUGFnZSI6Il9kaXJlY3QiLCJwYXNldjoiLCJpYXRpbi2Eb3dubG9hZCI6InByZXZpb3VzUGFnZSI6InB1Ym9pY2FoaW9uIn19&_cf_chl_tk=4aijgL3NfYbsMgXTRO__MaarORcBHBO9dlosTbSHAdw-1768723448-1.0.1.1-YXwpHcz88O3FzuRhMSIb8v_yYnck6hmtov7WcYivhDI.
- Dr. Awaludin, S.E., M.M., M.Si. 2025a. Aplikasi Srikandi Desa “Transparan dalam Anggaran, Tumbuh dalam Kreasi,” issued 2025. <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855>.
- . 2025b. *Manajemen Sumber Daya Manusia Pemimpin Dan Karyawan*. Kaizen Sarana Edukasi.
- . 2025c. “Perempuan Desa Sebagai Penggerak Ekonomi Digital : Analisis Partisipasi Dalam Akuntabilitas Dana Desa Dan Inovasi Ekonomi Kreatif.” *BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance* 3: 2071-79.
- Dwight Waldo. 1948. “2015.74031.The-Administrative-State-A-Study-Of-The-Political-Theory-Of-American-Public-Administration.Pdf.” <https://ia601508.us.archive.org/o/items/in.ernet.dli.2015.74031/2015.74031.The-Administrative-State-A-Study-Of-The-Political-Theory-Of-American-Public-Administration.pdf>.

- Eko, Sutoro. 2026. "Kajian Pemikiran Sutoro Eko Dan Gagasan Tentang Desa, Negara Dan Demokrasi Warga." Radar NTT. 2026. <https://radarntt.net/esai/kajian-pemikiran-sutoro-eko-dan-gagasan-tentang-desa-negara-dan-demokrasi-warga/>.
- Fitria, Dkk. 2019. "Peran Kepala Desa Sebagai Pengambil Keputusan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tangkan Kecamatan Awang Kabup." *JAPB* 2 (2): 640–56.
- Funds, Trust, Partner Relations, and Development Finance. 2021. "2021 Trust Fund Annual Report."
- Gary Yukl, William L. Gardner, III. 2020. *Leadership in Organizations*. https://api.pageplace.de/preview/DTo400.9781292314426_A39573241/preview-9781292314426_A39573241.pdf.
- Haeruddin. 2022. "Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa (Studi Pada Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto Kabupaten." *Sultra Journal Of Political Science Volume 4 Nomor 1, April 2022* 4 (April): 12–26. <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sjps/article/view/359>.
- Hermawan, Agus. 2025. "MACOA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Digitalisasi Desa Bala : Pengembangan Website Sebagai Wadah Informasi Dan Layanan Publik Digitalization of Bala Village : Website Development as a Platform For" 3 (1): 57–65.
- Idm, Nilai, Jawa Barat, Desa Dan, Sosial Alami, Indeks Komposit, Perangkat Indikator, Akses Pendidikan, et al. 2024. "Komponen Indeks Desa Membangun Tahun 2024."
- Indonesia, Pemerintah Republik. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>.
- Institutions, Public. n.d. "Trust in Public Institutions Lessons from the OECD Trust Survey in Portugal Lessons from the OECD Trust Survey In."
- Kurnia, Nanda. 2025. "Peranan Kepala Desa Dalam Optimalisasi Kinerja Aparatur Desa Di Desa Balai Sebut Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau" 3 (2): 267–76.

- Labolo, Muhadam. 2014. *Vemahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian. Teori, Xonsep, Dan Pengembangannya*. [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/440/2/isi-Memahami Ilmu Pemerintahan.compressed.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/440/2/isi-Memahami%20Ilmu%20Pemerintahan.compressed.pdf).
- Ladiqi, Suyatno, Ismail Suardi Wekke, and Cahyo Seftyono. n.d. *“Religion , State and Society : Exploration of Southeast Asia.”*
- Langkar.id. 2026. *“Borong Penghargaan Nasional! Inovasi Desa Antar Kalsel Bersinar Di Hari Desa Nasional 2026.”* 2026. <https://www.langkar.id/borong-penghargaan-nasional-inovasi-desa-antar-kalsel-bersinar-di-hari-desa-nasional-2026/>.
- Linjasmin Iska Dachi, Sepma Wati Dakhi, Elazhari. 2024. *“Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.”* *Journal Genta Mulia* 15 (01): 320–31. <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>.
- Muhammad Armia, dkk. 2023. *“Komunikasi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mempercepat Pelayanan Publik Dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat.”*
- Negara, Ilmu Administrasi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Ilmu Administrasi Negara, and Universitas Muhammadiyah Makassar. 2021. *“Pengambilan Keputusan Kepala Desa Kalebarendeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”* 2.
- Northouse, P. G. 2021. *“Leadership: Theory and Practice Ninth Edition.”* SAGE Publications, Inc. 13 (3). <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3786973>.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=16102>.
- Park, Y U R I, and Anjali Sah. 2022. *“2022 Citizen Engagement Annual Report.”*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2015. *“Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.”* <https://drive.google.com/file/d/1WbyVy5672UhvpdiuOFxKuTA4XusDufUh/view>.
- Persada, Pena, and Kerta Utama. n.d. *“Upaya Pencapaian Sdgs : Potret Keterlibatan Pemerintah.”*
- Pilichowski, Elsa. 2023. *“OECD Government at a Glance 2023,”* no. June.
- Press, Unhan. n.d. *Geoeкономи Geopolitik.*
- Public, J E, Boston Houghton, and Mifflin Company. 2003. *“Anderson, J. E. (2003).” Mifflin, 1–34.*
- Publicuho, Journal, Ahmad Riyadh, Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, and Jawa Timur. 2024. *“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Medalem 1”* 7 (4): 2351–67.
- Putra, Ade, Ode Amame, and Abdul Kahar. 2025. *Dinamika Administrasi Pemerintahan Desa Di Indonesia.* https://D1wqtxts1xzle7.Cloudfront.Net/125146749/Dinamika_Administrasi_Pemerintahan_Desa_Di_IndonesiaA_E_Book-libre.pdf?1761558502=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDINAMIKA_ADMINISTRASI_PEMERINTAHAN_DESA.pdf&Expires=1768730500&Signature=F-gPX7uYAYMHPoBqSQgxqTi~8bpekJT7Jajmq3lvGCiUNO1TgSTtsCPJD8leoav4300BPMRNQA-osrCFqu3CvjcgbbS6b1-NDnU2632e686ZzioebaoV31pIpoX7ruPd5rRsouZ2OjaI2bFRKE4P8yqpHRLjpGcXrY2NRZyeQRkUo~~8cxTV-kDcyWDlwz5IXHjbwo9qvwEltM7v3HY5s sjR2ifn6IkFzhCKXJidqG62KsMw6HwkoyKc4VxLBZlw7skoV1LEMg3Duf7hSWCxtihePtsR9roEnO6-8gVsdnaPhYY~hoB7-7dJUMW-xoQ1lh91tLu1GWpZVTC4L6LA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 2007. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan.* <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=3121>.

- Report, Annual. 2022. *"The Future Is"*
- Resdati, S.Sos., M.Si., M.Si. Dr. Achmad Hidir, and M.Si. Drs. Syafrizal. 2021. *Sosiologi Perdesaan*. CV. Alliv Renteng Mandiri. https://www.researchgate.net/profile/Achmad-Hidir/publication/359809727_sosiologi_perdesaan/links/624f895eef013420666090cb/sosiologi-Perdesaan.pdf?origin=scientificContributions.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=21082>.
- Safaruddin, Dkk. 2025. *"Strategi Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Dan Masyarakat Dalam Tata Kelola Dana Desa Untuk."* *Madaniya*, Vol. 6, No. 4, November 2025 6 (4): 2734-42.
- Science, Computer, and Jesper Simonsen. 1994. *"Herbert A . Simon : Administrative Behavior How Organizations Can Be Understood in Terms of Decision Processes Herbert A . Simon : Administrative Behavior - How Organizations Can Be Understood in Terms of Decision Processes."*
- Seperempat, Refleksi, Abad Pemikiran, and Gerakan Fahmina. n.d. *"Refleksi Seperempat Abad Pemikiran Dan Gerakan Fahmina."*
- Siagian, Sondang P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia / Sondang P. Siagian*. <https://ailis.lib.unair.ac.id/opac/detail-opac?id=3e9498a0bc06c60b3a06ae5a7cf5151d23958f2f>.
- Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah. 2023. *" , Hendra Sukmana 2"* 20 (1).
- Simarmata, Nurputri Yunita, and Edy Sutrisno. 2013. *"Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Prinsip Good Governance Di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Capaian EPPD (Evaluasi Peyeleggaraan Pemerintah Derah) Kota Bekasi Pada Lima Tahun Tentunya Antisipasi Yang Dilakukan Kecamatan Rawalumbu Sebagai Salah Satu Perangkat Daerah Kota Bekasi Yang Mampu Memberikan Inovasi Pelayanan Yang Lebih Baik Kepada Masyarakat Memiliki Peran Penting Dan Tanggungjawab Dalam Meningkatkan Kualitas Kecamatan Rawalumbu Merupakan Salah Satu Instansi Pemerintah Daerah Kota Bekasi Yang Bertugas , Bertanggung Jawab Dan Membantu Walikota*

Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di.”

- Sondang P. Siagian. 2015. *Teori & Praktek Kepemimpinan*.
<https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=21987>.
- Subianto, Prabowo, Buku Strategi, and Transformasi Bangsa. 2025.
“RPJMN Tahun 2025–2029.” [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumen bappenas/konten/Dokumen 2025/Konten/%7BDigital%7D Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumen/bappenas/konten/Dokumen_2025/Konten/%7BDigital%7D/Ringkasan_RPJMN_Tahun_2025-2029.pdf).
- Sufi, Ivan Septian, Sumardi, Nurafaizi, Umiati. 2023. “Peran Kepemimpinan Sebagai Agen Perubahan Dalam Menyelenggarakan Sekolah Penggerak.” *Jurnal Pendidikan Widya Tama* 20 (2): 179–84.
- Sugesti, Tutik, Astri Novia Siregar, and Bahdin Nur Tanjung. 2024. “Principal Leadership Model in Improving the Quality of Education.” *Holistic Science* 4 (2): 338–45.
<https://doi.org/10.56495/hs.v4i2.667>.
- Suseno, Franz Magnis. 2016. “FMS-Etipol2.Pdf.”
<https://repo.driyarkara.ac.id/26/1/FMS-Etipol2.pdf>.
- Wandagau, Beni. 2015. “Pendahuluan.”
- William Michael Reid, Claudia J. Dold. 2018. “Burns_Senge_and_the_Study_of_Leadership.Pdf.”
[https://www.researchgate.net/publication/324086124_Burns _Senge_and_the_Study_of_Leadership](https://www.researchgate.net/publication/324086124_Burns_Senge_and_the_Study_of_Leadership).
- Wirayadi. 2025. “Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Desa Di Desa Inggis.” *Academia: Ju* 5 (2): 117–30.
<https://www.jurnalp4i.com/index.php/academia/article/view/5173/3911>.
- Yunanto, Sutoro Eko. 2023. *Hilangnya Penghidupan Desa*. APMD Press.
[https://www.researchgate.net/profile/Adji-Muhammad-2/publication/380572647_Hilangnya_Penghidupan_Desa_Ap md_Press/LINKS/664410C17091B94E932BD9BD/Hilangnya-Penghidupan-Desa-Apmd-PRESS.pdf?origin=publication_detail&_tp=eyJlb250ZXhoIjpw ImZpcnNoUGFnZSI6InB1YmxeYzFoZWouliwicGFnZSI6InB1](https://www.researchgate.net/profile/Adji-Muhammad-2/publication/380572647_Hilangnya_Penghidupan_Desa_Apmd_Press/LINKS/664410C17091B94E932BD9BD/Hilangnya-Penghidupan-Desa-Apmd-PRESS.pdf?origin=publication_detail&_tp=eyJlb250ZXhoIjpwImZpcnNoUGFnZSI6InB1YmxeYzFoZWouliwicGFnZSI6InB1)

YmxpY2FoaW9uRG93bm9vYWQlLCJwcmV2aW91c1BhZ2Ui
OijwdWJsaWNhdGlvbiJ9fQ&__cf_chl_tk=38MfAdyVQoQoxf
QQpIhLNQ.YF_bIKFFbkppUDXFGT18-1768662874-1.0.1.1-
7vC2tPtzwqGsSmzs7V3nCJadpI5TNWoBL4DQDGh3PT8.

Zain, Evi Mufrihah, and Susetyowati Sofia. 2025. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Cv. Eureka Media Aksara. <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/618319-manajemen-sumber-daya-manusia-ad120234.pdf>.

Glosarium

Akuntabilitas:

Kemampuan aparaturnya desa dan kepala desa untuk mempertanggungjawabkan kebijakan, program, dan penggunaan anggaran kepada masyarakat.

Administrasi Desa:

Seluruh proses pencatatan, pengarsipan, dan pengelolaan dokumen resmi di tingkat desa untuk mendukung pelayanan publik.

Aparatur Desa:

Perangkat desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Asas Partisipatif:

Prinsip yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Desentralisasi Desa:

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.

Digitalisasi Pelayanan Desa:

Transformasi pelayanan administrasi desa melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan kepada masyarakat.

Good Village Governance:

Tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Integritas Kepemimpinan:

Sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab yang harus dimiliki oleh kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Inovasi Kepemimpinan Desa:

Kemampuan kepala desa untuk menciptakan terobosan baru dalam pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kapasitas SDM Desa:

Tingkat kemampuan dan kompetensi aparatur desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Keadilan Sosial Desa:

Prinsip pemerataan pembangunan dan pelayanan bagi seluruh warga desa tanpa diskriminasi.

Keluhan Masyarakat:

Aspirasi atau pengaduan warga desa terkait pelayanan publik, pembangunan, atau kinerja aparatur desa.

Kepemimpinan Desa:

Kemampuan kepala desa dalam memengaruhi, mengarahkan, dan memberdayakan aparatur serta masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

Kinerja Aparatur Desa:

Hasil kerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik dan menjalankan administrasi pemerintahan desa.

Literasi Digital Desa:

Kemampuan aparatur dan masyarakat desa dalam memahami serta menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik.

Manajemen Pelayanan Publik Desa:

Proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan administrasi desa kepada masyarakat.

Musyawarah Desa:

Forum pengambilan keputusan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Otonomi Desa:

Hak dan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Administrasi Desa:

Layanan resmi yang diberikan desa kepada masyarakat seperti pembuatan surat keterangan, dokumen kependudukan, dan administrasi lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat Desa:

Upaya kepala desa untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa.

***Servant Leadership* (Kepemimpinan Pelayan):**

Model kepemimpinan yang menempatkan kepala desa sebagai pelayan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga.

Sistem Informasi Desa:

Platform digital yang digunakan untuk mengelola data desa dan mendukung transparansi pemerintahan desa.

Transparansi Desa:

Keterbukaan informasi desa kepada masyarakat terkait kebijakan, program, dan penggunaan dana desa.

Undang-Undang Desa:

Landasan hukum utama penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014).

Visi Pembangunan Desa:

Arah dan tujuan jangka panjang yang ditetapkan kepala desa dalam membangun desa yang mandiri dan sejahtera.

Profil Penulis



Dr. Awaludin, S.E., M.Si.

Lahir di Medan 13 November 1979. Lulus S1 UTND, S2 USU dan S3 UPI YAI Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Tahun 2019. Saat ini sebagai Dosen di Universitas Tjut Nyak Dhien Medan pada Program Studi Manajemen. Tahun 2025 menerbitkan buku yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia – Pemimpin dan Karyawan”. Tahun 2025 juga memenangkan HIBAH DRPM yang berjudul “Peran Pengetahuan Perempuan Desa dalam Mendorong Akuntabilitas Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Desa Rimo Mungkur”.

Kepemimpinan desa memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan nasional. Desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga kualitas kepemimpinan kepala desa sangat menentukan keberhasilan pelayanan publik, pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam era otonomi desa dan meningkatnya tuntutan transparansi serta akuntabilitas publik, kepala desa dituntut untuk tidak hanya mampu menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki kapasitas kepemimpinan yang berintegritas, partisipatif, dan adaptif terhadap perubahan. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi pemikiran akademik dan praktis dalam memperkaya kajian kepemimpinan desa, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Buku ini disusun dengan pendekatan konseptual dan kontekstual, mengintegrasikan teori kepemimpinan, administrasi publik, serta praktik pemerintahan desa. Pembahasan dalam buku ini mencakup kedudukan dan peran kepala desa, dinamika sosial dan politik desa, pengambilan keputusan publik, pelayanan publik desa, hingga tantangan dan model ideal kepemimpinan desa di masa depan. Dengan pendekatan tersebut, buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kepemimpinan desa, baik bagi kalangan akademisi, mahasiswa, maupun praktisi pemerintahan desa. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia akademik dan praktik pemerintahan desa, serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan desa yang mandiri, demokratis, dan berkeadilan. Selamat membaca!



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / (0353) 3234874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbn

ISBN 978-634-278-153-1

